

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Dasar *Good Governance*

Istilah *Governance* sudah dikenal dalam literatur Ilmu Politik Hampir 120 Tahun. Terutama dalam lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *Good Governance* dalam berbagai program bantuannya. *Good Governance* merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Sadu Wasistiono (2003:23) mengemukakan bahwa tuntutan akan *Good Governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mamapu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *Good Governaiice*.

Secara implisit kata *good* dan *Good Governance* mengandung dua pengertian ; pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang

meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam implementasinya *Governance* meliputi tiga institusi yang satu dan yang lainnya berkaitan, yaitu, Negara (*state*), Sektor Swasta (*private sector*), dan lembaga swadaya masyarakat (*civil society*). Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan lembaga swadaya masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Saduwastiono, (2003:31) Ketiga domain dalam *Governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas dibidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta karena didalam masyarakat terjadi interaksi dibidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Jelas bahwa *good Governance* adalah masalah pertimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *Governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang

kompeten dibutuhkan melalui diterapkan sistem demokrasi , rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Esensi dari konsep *good Governance* sebagaimana diuraikan diatas adalah kekuatan konsep Governance terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana Pemerintah, atau satuan kerja publik itu bekerja untuk bekerja dan melindungi tuntutan, yang berupa harapan dan kebutuhan, dari yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan Pemerintahan: tampak pola pemikiran yang memfokuskan kepada yang diperintah, warga masyarakat atau rakyat (Ndraha, 2000 :7).

Menurut Kencana, (1994: 32-34) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemerintah dengan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam Pemerintahan,

Rasyid, (1997: 100) Selanjutnya Tujuan utama dibentuknya suatu Pemerintahan yaitu : pada dasarnya dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang dekat rakyat, semakin dekat Pemerintah dengan rakyat semakin baik pelayanan yang diberikan.

Menurut Rasyid, (1997 : 13) Secara umum tugas-tugas pokok

Pemerintahan mencakup 7 bidang, yaitu:

1. Menjamin keamanan Negara sengaja kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat mengulingkan Pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dngan mencegah terjadinya gentok-gentok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyaakat dapat berlangsung secar damai.
3. Menjamin diterapkannya Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan setatus apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan daam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedarmayanti (2004 : 9) Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karna itu tugas dari Pemerintah adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupa bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasakan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintahan dalam memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorintasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / negara”

3. Fungsi Ilmu Pemerintahan

Ndraha, (97: 18) Ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai dua fungsi ; ke luar dan kedalam. Ke luar, suatu ilmu yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Kedalam berfungsi sebagai alat menguji dirinya sendiri. Demikian Fred N. Kerlinger menjelaskan.

Situmorang, (1993 :7) Pemerintahan dapat diartikan sebagai badan atau lembaga-lembaga para penguasa sebagai pejabat Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan tersebut diharapkan mentaati seluruh ketentuan hukum dan batas wilayah negara, baik setiap warga negara secara perorangan maupun secara kolektif oleh setiap komponen Pemerintah maupun kemasyarakatan.

Budiarjo, (2003: 21) pengertian Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian, atau alokasi.

Suryaningrat (1987 : 2) dalam bukunya mengenai ilmu Pemerintahan mengatakan :

”Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan Pemerintah, Pemerintahan yang adil dan Pemerintahan yang demokrasi. Sedangkan Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan

kekuasaan atau dengan kata lain, Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan”.

Sitanggang (1998 :118) Pemerintah adalah lembaga atau suatu organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat. Sedangkan Pemerintahan adalah Bergeraknya semua fungsi-fungsi kedaulatan atau kekuasaan negara dalam mencapai tujuan bersama, dalam kenyataan sehari-hari dapat menunjukkan keutuhan kegiatan Pemerintah seperti Pemerintahan Kabupaten Desa atau Kelurahan dan lain-lain dalam pengertian umum.

Ndraha, (2003:428) Pemerintahan terlebih dahulu sebagai suatu kegiatan atau proses yaitu proses penyediaan dan distribusi pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan, perilaku kegiatan itulah yang disebut dengan Pemerintah.

Suryaningrat (1992 : 10-11) Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, sedangkan Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan pemerintah.

Ndraha, (2005 : 57)“ Pemerintah itu adalah kegiatan Pemerintahan” Jadi Pemerintahan adalah kegiatan Pemerintah. Pemerintah dianggap given, dan kegiatannya itulah dianggap Pemerintahan.

Pemerintahan menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2003 : 171) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan yang tidak hanya melaksanakan tugas eksekutipsaja, melainkan juga melakukan tugas-tugas lainnya termasuk tugas

eksekutif dan yudikatif. Pengertian Pemerintahan memiliki perbedaan dengan pemerintah karna pemerintah adalah “Pemerintah mencakup pengertian tentang setruktur kekuasaan dalam suatu Negara , sedangkan Pemerintahan lebih menggambarkan peralatan atau organ Pemerintah sendiri”.

Syafiie, (1998:18) Berdasarkan pandangan diatas, Pemerintah dimaknai sebagai cara atau teknik memerintah. Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. adapun pengertian Ilmu Pemerintahan adalah “Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legeslatif), kepemimpinan dan koordinasi Pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala Pemerintahan secara baik dan benar.

Ndraha (2005:257) Pemerintah itu adalah kegiatan Pemerintah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pemerintah itulah Pemerintahan. Jadi Pemerintahan adalah kegiatan Pemerintah. Pemerintah dianggap given, dan kegiatannya itulah Pemerintahan.

Ndraha, (2003:74) Selanjutnya berbagai konsep (definisi) tentang Pemerintah menurut Ndraha adalah:

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing (Proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga Negara seperti diatur dalam UUD (konstitusi) suatu Negara
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia

dibawah undang-undang 1945 : kekuasaan Pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan eksekutif.

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah : aparat Pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan atau lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan, tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayanan, yaitu Pemerintah dianggap sebagai sebuah (Toko) dan Pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (Pembeli).
7. Pemerintah dalam konsep pemerintahan pusat, yaitu penggunaan kekuasaan negara pada tingkat pusat (Tertinggi): pada umumnya diharapkan pada konsep Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah, yaitu berbeda dengan Pemerintah pusat yang mewakili Negara, Pemerintah Daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep Pemerintah wilayah, yaitu Pemerintah dalam arti ini dikenal dalam Negara yang menggunakan asas dekonsentrasi, contohnya Indonesia di bawah UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah. Kekuasaan (urusan) pusat di daerah dikelola oleh Pemerintah wilayah.
10. Pemerintah dalam konsep Pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi Pemerintahan Belanda (binnenlandsbestur, BB pamong praja) dibahas secara panjang lebar oleh bayu Suryaningrat dalam mengenal ilmu Pemerintahan (1980, 16-38).
11. Pemerintahan dalam konteks ilmu Pemerintahan, yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (Normatif) atau secara empirik memproses jasa publik dan layanan sipil.

Sitanggang, (1998: 119) Tujuan diadakan Pemerintah adalah untuk mewujudkan tujuan Negara untuk kebahagiaan bersama sesuai dengan asas Negeranya yang tidak lepas dari sipat kemanusiaan warganya secara mikro dan makro cosmos, sedangkan bagi Bangsa Indonesia keberadaan Pemerintah adalah

kehendak rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rasyid, (1997: 100) Selanjutnya Tujuan utama dibentuknya suatu Pemerintahan yaitu : pada dasarnya dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang dekat rakyat, semakin dekat Pemerintah dengan rakyat semakin baik pelayanan yang diberikan,

Rasyid, (1997 : 13) Secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan mencakup 7 bidang, yaitu:

1. Menjamin keamanan Negara sengaja kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat mengulirkan Pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dngan mencegah terjadinya gentok-gentok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyaakat dapat berlangsung secar damai.
3. Menjamin diterapkannya Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan setatus apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan daam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedarmayanti (2004 : 9) Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang

menghormati kedaulatan rakyat, oleh karna itu tugas dari Pemerintah adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupa bangsa

4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

4. Teori Kebijakan

Kansil, (2003: 190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur Pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut George C.Edward III, kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Model yang dikemukakan Edwards III dalam Agustino (2012:149) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan ,(4) struktur birokrasi.

Kempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.

Kencana, (2005: 145) Kebijakan Pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh Pemerintah pusat dengan perhatian utamanya adalah publik policy, yaitu apapun yang dipilih oleh Pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Nugroho, (2006: 25) Sedangkan kebijakn publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bahkan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di Daerah. Dalam

Penelitian ini merupakan study tentang mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan

Menurut Wijaya, (2000:289) dalam artikel nya yang di muat oleh *economics jurnal* ada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi

a. Tahap masyarakat tradisional

Pada tahap masyarakat tradisional ini, masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi primitive dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tak rasional serta adat istiadat. Tingkat produksi dan produktivitas sangat rendah

b. Tahap prasyarat lepas landas

Tahap ini merupakan transisi persiapan mencapai pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut.

c. Tahap lepas landas

Tahap lepas landas ditandai oleh perubahan drastic dan pesat. Ciri tahap ini adalah terjadinya kenaikan investasi produktif, pertumbuhan sektor industri yang pesat, dan terbentuk kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang menjamin pertumbuhan cepat.

d. Tahap gerak ke arah kedewasaan

Tahap ini merupakan tahap dimana teknologi canggih sudah digunakan secara efektif dalam proses produksi dan pengolahan sumber-sumber daya alam. Ciri – ciri nya adalah tinginya keterampilan tenaga kerja serta semakin dominannya sektor industry manufacturing yang menggantikan dan mendesak sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional berupa perubahan system manajemen dan pengelolaan bisnis. Masyarakat semakin menyadari akibat-akibat atau dampak industri terhadap kehidupan lingkungan

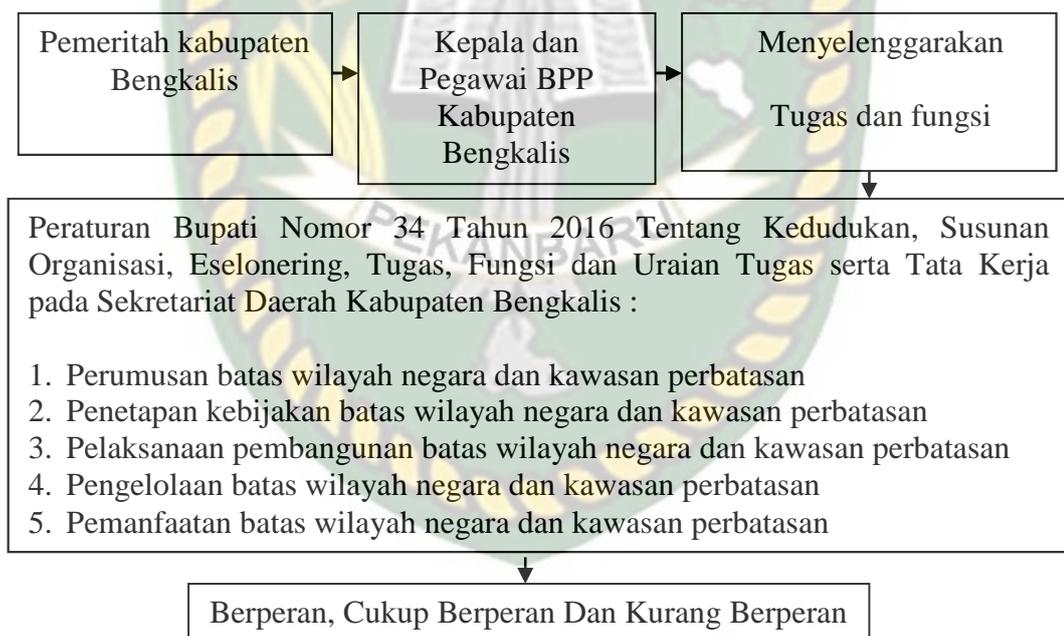
e. Tahapan konsumsi misal tinggi

Tahap konsumsi tinggi merupakan dimana masyarakat lebih menekankan pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan kemakmuran merupakan fokusnya

B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta terperinci dan terpercaya indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. dalam hal ini variabel-variabel Pelaksanaan Kebijakan Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini tentang “Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan. Studi kasus Kecamatan Rupert Utara ” secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar II.2 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan. Studi kasus Kecamatan Rupert Utara



Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

C. Hipotesis

Diduga Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Badan Pengelolaan perbatasan dalam Mengelola Wilayah Perbatasan di Kecamatan Rupert Utara

belum terlaksana dengan baik, dimana terlihat bahwa pengembangan batas wilayah masih mengalami kemunduruan dalam pengelolaannya terlihat akses jalan yang belum tersedia sehingga memperlambat akses perekonomian daerah, belum adanya gedung sekolah dalam meningkatkan sumber daya pengetahuan penduduk tempatan, serta kurangnya penjagaan dan keamanan terkait pos-pos dititik perbatasan dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenangan negara tetangga dalam berlayar terutama penangkapan ikan serta belum adanya kebijakan secara luas dalam meningkatkan sumber daya alam terkait meningkatkan potensi pariwisata pantai yang ada.

D. Konsep Operasional

Untuk memahami berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis menjelaskan tentang konsep operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.
2. Perumusan berasal dari kata dasar rumus. Perumusan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perumusan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
3. Penetapan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
5. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

6. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penilaian yang mana sebagai batasan-batasan penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep operasional variable Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan. Studi kasus Kecamatan Rupert Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table II.I Tabel Operasional Variabel Penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Wilayah Perbatasan. Studi kasus Kecamatan Rupert Utara

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Kebijakan Pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh Pemerintah pusat dengan perhatian utamanya adalah publik policy, yaitu apapun yang dipilih oleh	Peran Pemerintah Kabupaten dalam Mengelola Wilayah Perbatasan.	1. Perumusan	a. Melakuan perumusan batas wilayah dan kawasan perbatasan. b. Proses perumusan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		2. Penetapan kebijakan	a. Menetapkan kebijakan batas wilayah dan kawasan perbatasan b. Proses penetapan	Baik Cukup Baik Tidak Baik

Pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, (Kencana	3. Pelaksanaan pembangunan	a. Melakukan pembangunan wilayah negara dan kawasan perbatasan. b. Jenis-jenis pembangunan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
	4. Pengelolaan	a. Bentuk pengelolaan b. Pelaksanaan pengelolaan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
	5. Pemanfaatan	a. Bentuk pemanfaatan b. Cara pemanfaatan	Baik Cukup Baik Tidak Baik

Sumber : *Modifikasi penulis, 2018*

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik, Cukup Baik, dan Tidak Baik. Adapun teknik yang digunakan dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang ditetapkan berada pada kategori >67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang ditetapkan berada pada kategori >34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang ditetapkan berada pada kategori >1-33%

1. Perumusan

Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap perumusan indikator yang ditetapkan berada pada kategori >60-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses pendataan dan pendaftaran indikator yang ditetapkan berada pada kategori >34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses pendataan dan pendaftaran indikator yang ditetapkan berada pada kategori >1-33%

2. Penetapan Kebijakan

Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap penetapan kebijakan indikator yang ditetapkan berada pada kategori >60-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap penetapan kebijakan indikator yang ditetapkan berada pada kategori >34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap penetapan kebijakan indikator yang ditetapkan berada pada kategori >1-33

3. Pelaksanaan Pembangunan

Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses indikator Pelaksanaan Pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori >60-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap Proses indikator Pelaksanaan Pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori >34-66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses indikator Pelaksanaan Pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori >1-33%.

4. Pengelolaan

Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses indikator yang ditetapkan pengelolaan berada pada kategori >60-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap Proses indikator pengelolaan yang ditetapkan berada pada kategori >34-66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses indikator pengelolaan yang ditetapkan berada pada kategori >1-33%.

5. Pemamfaatan

Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses indikator pemanfaatan yang ditetapkan berada pada kategori >60-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap Proses indikator pemanfaatan yang ditetapkan berada pada kategori >34-66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap proses indikator pemanfaatan yang ditetapkan berada pada kategori >1-33%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau